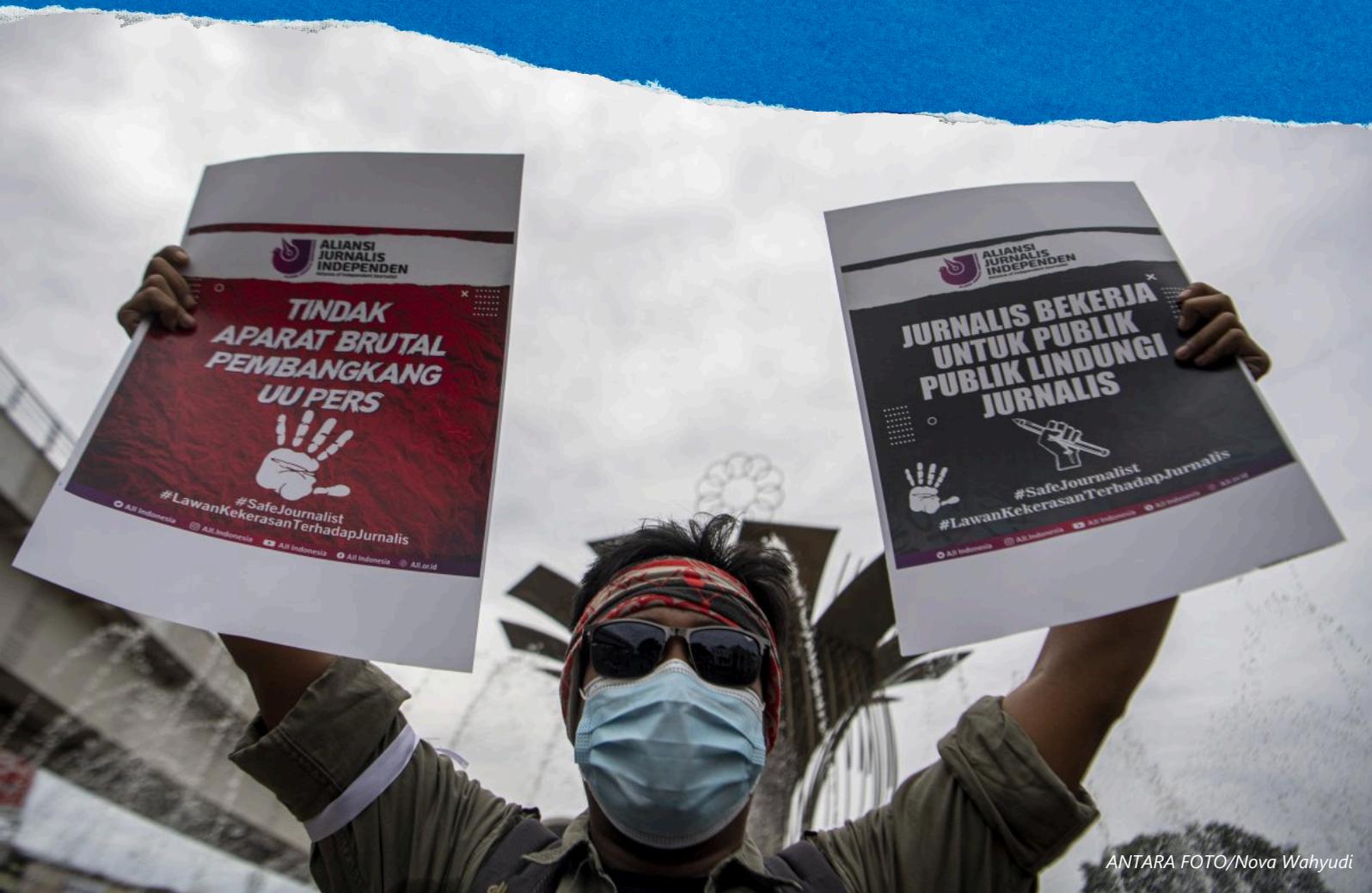




DEWANPERS



ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Buku Ringkasan Eksekutif
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2024

Dalam Pusaran Konsolidasi Tahun Politik 2024

Sebagai Gambaran Kondisi Kemerdekaan Pers di Indonesia
Selama Bulan Januari sampai Desember Tahun 2023



DEWANPERS

Jakarta
Tahun 2024

Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024

Dalam Pusaran Konsolidasi Tahun Politik 2024

PENYUSUN:

Dewan Pers

Periode Tahun 2022 – 2025

Ketua:

Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.

Wakil Ketua:

Muhamad Agung Dharmajaya

Anggota:

Arif Zulkifli

Asep Setiawan

Atmaji Sapto Anggoro

Paulus Tri Agung Kristanto

Totok Suryanto

Yadi Hendriana

Tim Teknis:

Winarto

Eriyanto

Bestian Nainggolan

Dian Andi Nur Aziz

Sekretariat Dewan Pers:

Imam Suwandi, Syariful, Deritawati, Wawan Agus Prasetyo, Maya Novinka, Zaqiah Darojad

PELAKSANA SURVEI:

PT Multi Utama Risetindo:

Penanggung Jawab:

Ir. Murdan Alfa Satyawan, Msi.

Pimpinan Proyek:

Imam Dermawan

Anggota:

Kustari

Iyan Imanuel Johannis

Muhammad Hifny

Wahyuningsih

Rahmat Suhardini Harahap

Nurul Andarwati

Asep Saepuloh

Ketua Tim Peneliti:

Ir. Murdan Alfa Satyawan, M.Si.

Anggota:

Ir. Iman Hilman, MM.

Dr. Ir. Wien Kuntari, M.Si

Ervik Ari Susanto, SIP.

Mercy Lona D.R.S.Silitonga, M.I.Kom.,CPR

Prima Yustitia Nurul Islami, S.KPm.,M.Si

Endang Purwanti, S.Sos

Drs. Medrial Alamsyah, MPS

Desain Grafis

Iyan Imanuel Johannis

Kata Pengantar

Segala puji kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih sayang dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh proses penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024 sekaligus dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan demokrasi di Indonesia, khususnya pada aspek yang terkait dengan kemerdekaan pers.

Survei Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024 telah dilaksanakan mulai Bulan Mei sampai dengan Bulan September 2024. Kami telah menyusun laporan hasil dari survei tersebut dalam 4 (empat) buku, Buku Ringkasan Eksekutif, Buku I Laporan IKP 2024 Nasional, Buku II Laporan IKP Per Provinsi 2024 dan Buku III Lampiran Data Survei IKP 2024. Buku-buku ini disajikan sebagai bagian dari upaya Dewan Pers menegakkan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai komponen bangsa berhak mengetahui kondisi kemerdekaan pers di Indonesia.

Buku Ringkasan Eksekutif dalam Laporan IKP 2024 Nasional ini diharapkan mampu menggambarkan kenyataan terkait kemerdekaan pers yang sesungguhnya terjadi di Indonesia selama Tahun 2023. Hasil rinci dari setiap indikator yang diukur dalam survei ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh berbagai pihak di tingkat nasional untuk meningkatkan kondisi kemerdekaan pers di kemudian hari. Sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi kita, pers yang merdeka tentunya dapat memberikan kontribusi yang sangat positif bagi segala sendi dalam kehidupan bernegara dan dapat menyumbang bagi kesinambungan pembangunan di Indonesia.

Perlu pengawalan dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah untuk dapat memastikan peningkatan terus menerus kondisi pers yang merdeka agar pemenuhan hak dan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat akan informasi berkualitas menjadi semakin baik. Pada gilirannya akan menciptakan situasi demokrasi yang sehat dan kondusif bagi tercapainya tujuan Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai Negara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Dewan Pers menyadari pentingnya peranan pers bagi terciptanya kehidupan berdemokrasi yang sehat, oleh karena itu masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan proses ke depan sangatlah diharapkan dan dinantikan.

Dewan Pers mengucapkan terima kasih kepada pemerintah cq. Kemenkominfo yang telah memfasilitasi ketersediaan bantuan negara sehingga survei IKP ini dapat terlaksana selama sepuluh tahun berturut-turut. Dewan Pers juga mengucapkan terima kasih kepada PT Multi Utama Risetindo yang telah bekerja sebagai mitra penyelenggara Survei IKP Tahun 2024 serta segenap narasumber, tim teknis dan sekretariat Dewan Pers yang telah

memberikan dukungan keahlian dan administratif dalam penyelenggaraan Survei IKP Tahun 2024 ini. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada para Informan Ahli yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei ini. Demikian juga kepada Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council/NAC), kami mengucapkan terima kasih atas kritik, masukan dan pandangannya terkait kondisi kemerdekaan pers di tingkat nasional.

Semoga laporan hasil pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers ini dapat menjadi referensi penting bagi berbagai pihak menuju langkah konkrit dan terukur dalam meningkatkan kemerdekaan pers di Indonesia.

Jakarta, September 2024

Ninik Rahayu

Ketua Dewan Pers

Ringkasan Eksekutif

Salah satu peran pers yang penting adalah sebagai perantara yang memudahkan proses komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat dan juga sebaliknya. Pemerintah di satu sisi bisa memanfaatkan pers sebagai saluran komunikasi publik yang terpercaya karena independensinya, dan masyarakat di sisi lain juga dapat memanfaatkan pers karena independensinya untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, kemerdekaan pers merupakan hal yang mutlak diperlukan. Negara harus menjamin kebebasan bersuara, berpendapat dan berekspresi, termasuk juga kepada pers. Dengan pers yang merdeka, media dapat menjalankan perannya secara leluasa dan juga terpercaya untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak dengan mengedepankan kepentingan publik, tanpa tekanan dari pihak manapun.

Tantangan yang dihadapi oleh pers di Indonesia dalam pusaran konsolidasi politik selama setahun belakangan adalah bagaimana pers dapat menjalankan fungsinya secara bebas untuk menyampaikan informasi yang akurat, aktual, faktual dan *cover both side* yang mengedepankan kepentingan publik dan tujuan-tujuan mulia demokrasi. Di tengah proses peralihan kepemimpinan dan pusaran konsolidasi politik di Indonesia Tahun 2024 ini, kemerdekaan pers yang merupakan kedaulatan rakyat harus tetap dibela oleh berbagai pihak demi menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik yang kita cita-citakan bersama.

Sejak dikembangkan mulai Tahun 2014¹, Dewan Pers telah melaksanakan Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) setiap tahun selama sebelas tahun terakhir. Metode *Mixed Method* yang konsisten sudah dilaksanakan sejak Tahun 2019 yang melibatkan sejumlah informan ahli dari unsur Negara, unsur Dunia Usaha, dan unsur *Civil Society* yang terdiri dari jurnalis, akademisi, LSM, perwakilan organisasi wartawan dan masyarakat umum. Sejak Tahun 2019 itulah Dewan Pers mulai melibatkan para informan ahli di seluruh provinsi di Indonesia dengan memberi kesempatan mereka untuk menilai kondisi kemerdekaan pers di wilayahnya masing-masing melalui kuesioner yang lalu dilanjutkan dengan forum diskusi di tiap provinsi untuk mendalami berbagai masalah terkait isu kemerdekaan pers di wilayahnya masing-masing. Diskusi kemudian dilanjutkan ke tingkat nasional dengan melibatkan informan ahli tingkat nasional dalam sesi *National Assessment Council* (NAC) yang diselenggarakan di Jakarta. Tahun 2024 ini, Dewan Pers melakukan survei di seluruh 38 provinsi di Indonesia dengan melibatkan juga 4 provinsi baru hasil pemekaran di Papua.

¹ <https://data.dewanpers.or.id/tentang-survey>

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dewan Pers mengukur 3 variabel lingkungan dan 20 indikator yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik mengukur 9 indikator, Lingkungan Ekonomi mengukur 5 indikator, dan Lingkungan Hukum mengukur 6 indikator. Survei dilaksanakan Bulan Mei – September 2024 di seluruh 38 provinsi di Indonesia dengan telah melibatkan 407 orang informan ahli, yang terdiri dari 393 informan ahli dari 38 provinsi dan 14 informan ahli tingkat nasional (*National Assessment Council*//NAC).

Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2024 adalah 69,36 turun sebesar -2,21 poin dibandingkan IKP Tahun 2023

Nilai IKP Tahun 2024 adalah sebesar 69,36 dan masuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai ini turun -2,21 poin dibandingkan nilai IKP pada Tahun 2023. Skor di setiap lingkungan berada dalam kisaran angka yang hampir sama, yaitu di sekitar 67-70, yang menunjukkan bahwa kondisi kemerdekaan pers nasional berada dalam kategori “Cukup Bebas” di semua lingkungan. Sekalipun demikian, Lingkungan Ekonomi skornya paling rendah, yaitu 67,74, Lingkungan Fisik & Politik memiliki angka lebih tinggi, yaitu 70,06, dan Lingkungan Hukum memiliki angka 69,44.

Perhitungan IKP Nasional didapat dari nilai IKP Provinsi (rata-rata nilai IKP dari 38 provinsi) dengan bobot 70%, ditambah dengan nilai IKP NAC (*National Assessment Council*) dengan bobot 30%. Hasil IKP Provinsi masih lebih tinggi dibanding IKP NAC, yaitu 71,64 berbanding 64,04, dan itulah yang menyebabkan nilai IKP Nasional jadi sedikit lebih rendah dibanding IKP Provinsi.

Sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2022 terjadi kenaikan IKP Nasional berturut-turut namun setelahnya, yaitu sejak Tahun 2022 terjadi penurunan sampai dengan Tahun 2024 ini. Penurunan terbesar sepanjang 6 tahun terakhir pelaksanaan Survei IKP adalah terjadi di Tahun 2023, dimana secara nasional nilai IKP turun sebanyak -6,31 poin, dan di semua variabel lingkungan besaran penurunan juga ada di sekitar -6 poin. Pada Tahun 2024 ini nilai IKP turun lagi namun tidak sebesar penurunan yang terjadi di tahun lalu, yaitu turun hanya sebesar -2.21 poin di tahun ini.

Penyebab turunnya skor IKP Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 ditentukan dengan terlebih dahulu membuat kriteria penentuan indikator yang lemah sehingga menjadi prioritas untuk diperbaiki berdasarkan hasil Survei IKP Tahun 2024. Kriteria tersebut adalah:

1. Di Tahun 2024, suatu indikator memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan nilai total lingkungannya. Alasan ini penting diambil karena jika ingin menaikkan nilai

IKP di tahun berikutnya maka perbaikilah semua indikator yang bernilai dibawah rata-rata nilai di lingkungannya.

2. Selama 6 tahun terakhir, suatu indikator memiliki nilai yang sebagian besar lebih rendah dibandingkan nilai total lingkungannya. Alasan ini penting diambil karena indikator-indikator ini selalu menjadi pekerjaan rumah hampir di setiap tahunnya sehingga tahun ini harus menjadi prioritas untuk dapat segera diperbaiki.

Berdasarkan kriteria di atas indikator di Lingkungan Fisik dan Politik yang lemah dan menjadi prioritas untuk dibenahi berturut-turut adalah: Kebebasan dari Kekerasan (62,69), Kebebasan dari Intervensi (68,90), Kesetaraan Bagi Kelompok Rentan (69,08), dan Akurat dan Berimbang (69,11).

Untuk Lingkungan Ekonomi, indikator yang menjadi prioritas untuk diperbaiki adalah Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), keduanya memiliki nilai lebih rendah dibandingkan rata-rata indikator di Lingkungan Ekonomi. Kedua indikator tersebut ternyata merupakan indikator dengan nilai di bawah rata-rata selama 6 tahun terakhir, dan sampai dengan Tahun 2024 ini masih di bawah rata-rata nilai indikator di Lingkungan Ekonomi.

Secara umum sebenarnya nilai Lingkungan Hukum di Tahun 2024 hanya turun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, namun ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas untuk diperbaiki mengingat angkanya di Tahun 2024 berada di bawah rata-rata nilai Lingkungan Hukum. Indikator tersebut adalah Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (62,72), dan Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (67,97).

Khusus indikator Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas nilainya terus berada di bawah rata-rata lingkungan selama 6 tahun terakhir, menunjukkan bahwa indikator ini selalu menjadi pekerjaan rumah dan sampai Tahun 2024 ini masih menunjukkan nilai yang relatif rendah. Adapun indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan adalah indikator yang baru di Tahun 2024 menunjukkan kelemahan. Dengan demikian, kedua indikator tersebut dapat menjadi prioritas untuk diperbaiki mengingat nilainya yang lebih rendah dibanding rata-rata, dan juga selalu di bawah rata-rata nilai Lingkungan Hukum selama 6 tahun terakhir.

Secara keseluruhan, indikator yang menjadi isu utama dan prioritas untuk diperbaiki, yaitu: Kebebasan dari Kekerasan, Kebebasan dari Intervensi, Akurat dan Berimbang, Kesetaraan Bagi Kelompok Rentan, Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, Tata Kelola Perusahaan yang Baik,

Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas, dan Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan di atas, dengan demikian ada 8 indikator yang menjadi isu utama dan menjadi prioritas untuk diperbaiki berdasarkan Survei IKP Tahun 2024, yaitu:

- 1) Di Lingkungan Fisik dan Politik:
 - a) Kebebasan dari Kekerasan (62,69),
 - b) Kebebasan dari Intervensi (68,90),
 - c) Kesetaraan Bagi Kelompok Rentan (69,08).
 - d) Akurat dan Berimbang (69,11),
- 2) Di Lingkungan Ekonomi:
 - a) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (65,69),
 - b) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (63,74).
- 3) Di Lingkungan Hukum:
 - a) Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (61,60),
 - b) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (67,52).

Yang pertama, nilai indikator Kebebasan dari Kekerasan (62,69), IA Nasional memberikan nilai yang jauh lebih rendah terhadap indikator ini dibandingkan IA Provinsi. Beberapa IA Nasional pada saat acara FGD NAC mengkonfirmasi bahwa masih ada tindak kekerasan terhadap wartawan, bahkan di Tahun 2024 ini cenderung bertambah. Berdasarkan catatan data sekunder dari Aliansi Jurnalis Independen yang diperkuat oleh data dari LBH Pers, ada sebanyak 87 kasus kekerasan di Tahun 2024 ini, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 61 kasus. Selain kekerasan fisik, terjadi juga serangan non fisik berupa serangan digital terhadap media dan kejadian ini biasanya menimpa ketika sebuah media menerbitkan tulisan yang agak sensitif, seperti isu korupsi maupun isu lingkungan.

Jika melihat kondisi kebebasan dari kekerasan di daerah, yaitu hasil penilaian informan ahli dari 38 provinsi yang membentuk nilai provinsi, cukup banyak provinsi yang memiliki nilai indikator Kebebasan dari Kekerasan yang rendah di bawah 60, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Papua, Sulawesi Tenggara, dan yang paling rendah adalah Lampung. Kasus kekerasan terhadap wartawan daerah paling banyak terjadi sebelum berita diterbitkan. Disamping itu jika ada kasus kekerasan maka penanganannya cenderung tidak tuntas, dan masih belum membuat efek jera bagi pelaku kekerasan.

Yang kedua, indikator Kebebasan dari Intervensi (68,90), informan ahli nasional memberikan nilai yang jauh lebih rendah terhadap indikator ini. Informan ahli nasional pada saat acara FGD NAC berpendapat bahwa intervensi yang dilakukan kepada perusahaan pers bisa dari dua arah. Pertama dari pihak eksternal yang memanfaatkan kondisi perusahaan pers yang sedang tidak baik-baik saja, dan yang kedua datang dari internal skema kepemilikan yang memiliki afiliasi politik maupun afiliasi bisnis tertentu yang akhirnya dapat mengintervensi ruang pemberitaan.

Rendahnya indikator Kebebasan dari Intervensi di Provinsi Lampung ini tidak terlepas dari masih banyaknya sensor peliputan, larangan pemberitaan dan adanya permintaan pencabutan berita yang sudah ditulis oleh wartawan. Intervensi pemerintah daerah terhadap kerja jurnalis masih menjadi masalah yang signifikan di Lampung. Bentuk-bentuk intervensi ini mencakup tekanan politik, di mana pemerintah daerah menekan media untuk tidak memberitakan isu-isu tertentu yang dianggap sensitif atau merugikan citra mereka. Sensor dan pembatasan akses juga kerap terjadi, dengan media lokal diinstruksikan untuk menyensor berita kritis serta jurnalis dibatasi aksesnya ke informasi publik. Tindakan intimidasi terhadap jurnalis juga menjadi taktik yang sering digunakan untuk membungkam laporan yang kontroversial atau negatif tentang pemerintah daerah. Bentuk intervensi yang masih sangat kental terjadi di Lampung menurut informan ahli di Lampung merupakan cerminan pejabat pemerintah yang belum mengerti kerja jurnalis sehingga ada kekuatiran bahwa kasus intervensi terhadap jurnalis akan berulang.

Yang ketiga, indikator Akurat dan Berimbang menjadi salah satu indikator prioritas untuk diperbaiki karena nilai IKP Nasionalnya di Tahun 2024 (69,11) berada di bawah rata-rata nilai di Lingkungan Fisik dan Politik (70,06). Informan ahli di 38 provinsi secara rekapitulasi sebenarnya memberi nilai 70,71, namun informan ahli tingkat nasional di NAC hanya memberi nilai 65,36 untuk indikator Akurat dan Berimbang ini. Informan ahli nasional pada saat acara FGD NAC menyampaikan bahwa kerja jurnalis yang belum terlalu bagus di aspek akurasi dan keberimbangan dalam pemberitaan ternyata juga memberi dampak terhadap maraknya kasus kekerasan dan intervensi terhadap jurnalis itu sendiri.

Penilaian informan ahli di 38 provinsi menempatkan Provinsi Bangka Belitung, Maluku dan Maluku Utara sebagai provinsi yang memiliki nilai kurang dari 60 untuk indikator Akurat dan Berimbang ini. Rendahnya indikator Akurat dan Berimbang 3 provinsi tersebut terutama karena memang masih rendahnya profesionalisme jurnalis dalam membuat pemberitaan, terutama juga dipengaruhi oleh adanya afiliasi politik dari media maupun jurnalisnya.

Yang keempat, indikator Kesetaraan bagi Kelompok Rentan (69,08), informan ahli nasional tidak banyak memberikan perspektif tentang indikator ini namun informan ahli di daerah menyampaikan bahwa rendahnya nilai indikator ini terutama disebabkan oleh masih sangat sedikitnya media yang menyampaikan berita yang dapat diakses oleh penyandang

tunarungu dan tunanetra. Provinsi Papua Tengah memiliki nilai indikator Kesetaraan Bagi Kelompok Rentan yang paling rendah.

Yang kelima, indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (65,69), termasuk di dalam Lingkungan Ekonomi dan menjadi indikator prioritas untuk diperbaiki di tahun ini. Informan ahli nasional memberi nilai lebih rendah untuk indikator ini dibanding penilaian dari informan ahli daerah.

Pada sesi FGD NAC, informan ahli nasional menyampaikan bahwa pers nasional masih sangat tinggi kebergantungannya kepada kelompok yang memiliki dana untuk kerjasama pemberitaan sekaligus juga memiliki kepentingan terhadap isi pemberitaan. Kelompok kepentingan yang kuat yang dapat mempengaruhi independensi media ini bisa berupa pemerintah, pemerintah daerah, tokoh politik dan dunia usaha. Salah seorang informan ahli tingkat nasional dari unsur akademisi menyampaikan bahwa jurnalisme yang dianut saat ini masih *commercial journalism* dan belum menjadi *public journalism*. Dengan sendirinya, media cenderung mengedepankan kedekatan relasi dengan pihak lain yang akan memberikan manfaat komersial walaupun mungkin beresiko terhadap independensi dari isi pemberitaannya, yang seharusnya untuk lebih membela kepentingan publik.

Berdasarkan penilaian dari informan ahli di 38 provinsi, Provinsi Lampung, Maluku, Sulawesi Barat dan Bangka Belitung adalah provinsi yang memiliki nilai indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat yang paling rendah. Faktor ekonomi yang sulit menjadi alasan utama media sangat bergantung bahkan mengemis iklan dan kemitraan pada pemerintah daerah, parpol dan perusahaan besar yang berpotensi dapat mempengaruhi kebijakan redaksinya.

Yang keenam, indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (63,74), informan ahli nasional memberi nilai lebih rendah (61,86) untuk indikator ini dibanding penilaian dari informan ahli daerah (64,54). Informan ahli nasional pada sesi FGD NAC menyampaikan lebih ke sisi manajemen dari perusahaan pers yang agak jauh dari ideal, apalagi media daerah kebanyakan masih UMKM yang masih bermasalah dalam pembagian tugas antara bisnis dengan redaksi. Sedangkan informan ahli di banyak daerah, yaitu di Papua Tengah, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara dan Sulawesi Barat, lebih menyoroti wartawannya yang masih belum mendapatkan upah yang sesuai aturan. Peraturan Dewan Pers Nomor 03 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pekerja pers harus mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, namun banyak media yang tidak bisa memenuhi aturan tersebut.

Kenyataan bahwa wartawan tidak selalu mendapatkan gaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah masalah yang serius dalam industri media. Hal ini diperparah dengan banyaknya media yang menghadapi kendala finansial untuk memenuhi standar gaji yang memadai. Media kecil atau media online menghadapi keterbatasan finansial yang lebih besar untuk memberikan kompensasi yang sesuai. Hal yang menjadi konsekuensi

logis dari kondisi ini adalah terciptanya pola hubungan yang bersifat kerjasama antara wartawan dengan perusahaan pers, yang dapat mengganggu independensi jurnalisisme karena sang jurnalis juga merangkap sebagai marketing. Anggota Dewan Pers Sapto Anggoro menyampaikan bahwa potensi masalah terjadi karena wartawan atau media dibayar oleh pemda maka bisa mempengaruhi independensi wartawan dan kebijakan redaksinya. Perlu ada solusi terobosan terhadap hal ini, misalnya dengan mendorong terciptanya *democracy trust fund* yang sedang dalam proses di Bappenas atau *endowment fund* yang digagas oleh Prof Adrianus Meliala.

Yang ketujuh, indikator Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (68,43), merupakan indikator prioritas untuk diperbaiki di Lingkungan Hukum karena memiliki nilai yang rendah. Informan ahli nasional memberi nilai jauh lebih tinggi (68,43) untuk indikator ini dibanding penilaian dari informan ahli daerah (58,68). Informan ahli nasional pada sesi FGD NAC menyampaikan bahwa panduan soal disabilitas dari Dewan Pers sudah ada namun belum ada laporan mengenai implementasinya di daerah. Acara yang diselenggarakan banyak media juga belum menyediakan akses untuk tunarungu, walaupun dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sudah.

Berdasarkan penilaian informan ahli di daerah, banyak provinsi yang memiliki nilai rendah pada indikator Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas ini, yaitu di Papua Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Lampung, Papua Selatan, Maluku, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Aceh, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. Bahkan informan ahli di Papua Tengah dan Sulawesi Barat memberikan nilai di bawah angka 40, atau masuk ke dalam kategori "Agak Bebas". Hampir semua informan ahli di provinsi-provinsi tersebut menyampaikan tidak adanya peraturan di daerah yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti tunarungu dan tunanetra.

Yang terakhir kedelapan, indikator yang juga menjadi prioritas untuk diperbaiki di Lingkungan Hukum adalah Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan karena memiliki nilai yang rendah, yaitu 67,52. Informan ahli nasional memberi nilai sedikit lebih rendah (67,14) untuk indikator ini dibanding penilaian dari informan ahli daerah (67,68).

Pada sesi FGD NAC, informan ahli nasional menyampaikan masih adanya potensi ancaman terhadap kemerdekaan pers dengan mendahulukan UU ITE atau KUHP lama untuk kasus-kasus jurnalistik. Salah seorang informan ahli tingkat nasional dari akademisi juga menyoroti adanya pasal perlindungan hukum terhadap jurnalis di UU Pers yang masih kurang, karena hanya menyampaikan secara normatif bahwa dalam melaksanakan tugas, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya informan ahli nasional juga mendorong sosialisasi tentang pentingnya UU Pers agar dapat dijadikan rujukan utama dalam menangani kasus hukum yang melibatkan jurnalis dan perusahaan pers.

Berdasarkan penilaian informan ahli di daerah, beberapa provinsi masih memiliki nilai rendah pada indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan ini, yaitu di Sulawesi Barat, Lampung, Jawa Timur, dan Papua Tengah. Informan ahli di daerah menyampaikan kasus peradilan yang mandek atau menjadi *restorative justice*. Selain itu masih ada kekhawatiran bahwa lembaga peradilan tidak mengutamakan UU Pers untuk mengadili kasus terkait jurnalisme.

Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan nilai IKP tertinggi di Indonesia, dengan nilai 80,91, dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang berkategori "Bebas".

Provinsi Kalimantan Selatan adalah provinsi dengan Nilai IKP tertinggi di Indonesia dengan nilai IKP sebesar 80,91. Hasil ini sekaligus juga mengukuhkan Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2024 menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia dengan nilai lebih dari 80 dan memperoleh kategori "Bebas", sementara 37 provinsi lainnya hanya memperoleh kategori di bawahnya, yaitu "Cukup Bebas". Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai IKP yang tinggi karena adanya peningkatan signifikan dari Kondisi Lingkungan Fisik Politik (+2,90), sedangkan Lingkungan Ekonomi dan Lingkungan Hukum mengalami penurunan -1,12 dan -1,59 poin. Indikator Pendidikan Insan Pers merupakan indikator yang dinilai paling tinggi di Kalimantan Selatan. Selain itu Kebebasan Media Alternatif (86,67), Kebebasan Berserikat (85,56), dan Keragaman Pandangan (85,17) juga memiliki nilai yang sangat tinggi.

Provinsi Kalimantan Timur yang pada tahun sebelumnya menjadi provinsi dengan nilai IKP tertinggi, tahun ini hanya menempati urutan kedua dengan Nilai 79,96 dan memperoleh kategori "Cukup Bebas". Provinsi lainnya yang juga relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Tengah (79,58), Provinsi Bali (79,42) dan Provinsi DI Yogyakarta (77,71).

Tiga provinsi teratas, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dalam 4 atau 5 tahun terakhir mendapatkan nilai IKP yang tinggi di sekitar 80an. Misalnya Kalimantan Selatan, dalam 4 tahun terakhir selalu berada di peringkat 10 besar nilai IKP secara nasional kecuali di Tahun 2022 hanya di peringkat ke-21. Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dalam 4 tahun terakhir selalu berada juga di 10 besar nilai IKP secara nasional.

Hasil IKP yang cenderung tinggi di Pulau Kalimantan memang ditunjukkan oleh banyaknya provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki nilai yang tinggi. Tahun 2024 saja tiga besar provinsi dengan nilai IKP tertinggi ada di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Utara pun masuk ke dalam 10

besar provinsi dengan nilai IKP tertinggi di Indonesia di Tahun 2024. Jika kita melihat ke 5 tahun ke belakang, ternyata memang banyak provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki nilai IKP yang lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Berdasarkan kelompok unsur informan ahli, secara umum informan ahli dari unsur negara cenderung memberi nilai lebih tinggi (yaitu 74,87) dibandingkan kelompok dari unsur lainnya. Nilai paling rendah diberikan oleh kelompok dari unsur *civil society* (masyarakat) yang terdiri dari pekerja pers, perwakilan organisasi wartawan, akademisi dan LSM seperti LBH Pers, maupun masyarakat pemerhati pers yang selama ini bersinggungan dengan dunia pers (67,59). Nilai informan ahli dari unsur *civil society* ini lebih rendah dibandingkan dengan informan ahli dari unsur dunia usaha (70,77).

Ini terjadi juga di tiap lingkungannya, yang menunjukkan bahwa kelompok informan ahli dari unsur *civil society* ini lebih merasakan kondisi kemerdekaan pers yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok unsur lainnya di semua variabel yang diukur. Indikator Kebebasan dari Kekerasan sangat mencolok mengindikasikan bahwa informan ahli dari unsur *civil society* paling banyak menjadi korban dari kasus kekerasan yang muncul selama Tahun 2023.

Jika dilihat berdasarkan lokasi, secara umum informan ahli tingkat nasional memberikan nilai yang lebih rendah (64,04) dibandingkan dengan informan ahli tingkat provinsi (72,08) dan informan ahli tingkat kabupaten (69,32). Hal ini menunjukkan bahwa banyak sisi lemah dari indikator yang diukur dalam Survei IKP lebih dirasakan di tingkat nasional. Misalnya indikator Kebebasan dari Kekerasan, menurut informan ahli tingkat nasional nilainya lebih rendah karena selain ada tindak kekerasan fisik terhadap wartawan juga ada kekerasan berbentuk lain yang tidak terlalu banyak muncul di tingkat provinsi dan kabupaten, yaitu kasus kekerasan digital yang menimpa media tingkat nasional.

Sementara itu, provinsi yang mendapatkan Nilai IKP paling rendah berturut-turut adalah: Papua Tengah (61,34), Lampung (62,04), Papua (65,60), Maluku (65,61), dan Sumatera Barat (66,61). Empat provinsi dengan peringkat terbawah, yaitu Papua Tengah, Lampung, Papua, dan Maluku dalam 6 tahun ke belakang selalu merupakan provinsi yang berada di luar 15 besar IKP secara nasional, kecuali untuk Papua Tengah yang baru diukur Tahun 2024 ini karena merupakan provinsi baru hasil pemekaran.

Penyebab Provinsi Papua Tengah memiliki nilai IKP yang rendah adalah karena sangat rendahnya nilai dua indikator yaitu Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (28,50), dan Jaminan Mempraktikkan Jurnalisme (36,42). Kedua indikator tersebut bahkan masuk ke dalam kategori merah jambu, yaitu "Kurang Bebas". Pada indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, disamping memang tidak ada sama sekali peraturan daerah yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, informan ahli juga menekankan pentingnya sosialisasi oleh pemerintah daerah,

khususnya Dinas Kominfo, kepada media agar dapat menyiarkan berita yang dapat diakses dan dipahami oleh penyandang disabilitas, seperti tuna rungu dan tuna netra.

Terkait Jaminan Mempraktikkan Jurnalisme, dari hasil FGD dengan informan ahli di Papua Tengah, mereka mengeluhkan sulitnya meliput suatu peristiwa, terutama yang melibatkan pemerintah daerah, karena sulitnya mendapatkan sumber berita. Petugas terkait dari pemda selalu enggan untuk diwawancarai atau menyampaikan suatu informasi karena wartawan harus langsung menghubungi pimpinan untuk mendapatkan informasi. Peran kehumasan tidak berjalan sama sekali dan walaupun ada informasi yang ingin digali selalu harus langsung ke pimpinan. Informan ahli juga meminta adanya instruksi dari pimpinan daerah atau sosialisasi kepada instansi di bawahnya tentang tugas-tugas jurnalistik agar lebih terbuka untuk bekerjasama dengan media dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wartawan. Selain itu mereka juga mengeluhkan banyaknya media baru yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai media jurnalistik dan mengungkapkan ketiadaan perda atau aturan yang mengatur hal ini.

Provinsi Lampung yang bernilai rendah, ternyata dalam 2 tahun belakangan ini selalu turun nilai IKP nya, yaitu dari 79,20 di Tahun 2022 turun tajam menjadi 69,76 di Tahun 2023 (turun -9,44) dan turun lagi di Tahun 2024 menjadi 62,04 (turun -7,72). Penurunan tersebut terjadi di semua variabel lingkungan dan untuk Tahun 2024, penurunan yang cukup tajam terjadi di Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu dari 71,98 di Tahun 2023 menjadi 61,80 di Tahun 2024 (turun -10,18 poin), dan Lingkungan Ekonomi, yaitu dari 68,69 di Tahun 2023 menjadi 61,67 di Tahun 2024 (turun -7,02).

Nilai indikator di Lampung yang sangat lemah dan menurun tajam dibandingkan tahun sebelumnya adalah Kebebasan dari Kekerasan, menurun dari 69,58 menjadi 40,33 (turun -29,25 poin). Dari hasil FGD dengan informan ahli di Lampung dan dikuatkan oleh data dari AJI, beberapa kasus kekerasan mengemuka, seperti: kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Lampung TV di Lampung Selatan, kepala desa mengintimidasi wartawan di Way Nipah, wartawan yang dilaporkan ke polisi terkait UU ITE di Tenggamus, sampai Gubernur Lampung yang meminta jurnalis Kompas TV menghapus video yang direkamnya.

Selain itu, indikator Kebebasan dari Intervensi di Provinsi Lampung juga bernilai rendah (58,04). Hal ini tidak terlepas dari masih banyaknya sensor peliputan, larangan pemberitaan dan adanya permintaan pencabutan berita yang sudah ditulis oleh wartawan. Indikator lainnya yang juga rendah dan turun cukup banyak dibandingkan tahun sebelumnya di Lampung adalah: Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (45,58), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (54,19), Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (56,61), dan Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (57,38).

Provinsi berikutnya yang turun banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah Provinsi Sumatera Barat. Nilai IKP Sumatera Barat turun dari 78,90 di Tahun 2023 menjadi

66,61 di Tahun 2024 atau turun sebesar -12,29 poin. Jika dilihat selisih penurunannya, paling besar ada pada indikator Kebebasan dari Kekerasan, yaitu dari 77,14 menjadi 54,64 (turun -22,50 poin). Informan ahli di Sumbar menyampaikan bahwa selama Tahun 2023 memang banyak terjadi kasus-kasus kekerasan yang menimpa wartawan, baik secara fisik maupun psikologis. Kasus-kasus tersebut antara lain: Ketua KPU Solok Selatan yang mengusir jurnalis dari Gedung KPU, ancaman dari oknum Humas Pemda Kota Padang yang pernah mengancam pemutusan kontrak iklan dengan Harian Singgalang, kasus intimidasi dan penghalangan untuk meliput kasus pemulangan paksa masyarakat Air Bangis di Pasaman Barat yang bahkan menimpa banyak jurnalis, dan kasus beberapa jurnalis diusir saat pelantikan Wakil Walikota Padang di Istana Gubernur Sumatera Barat, termasuk kasus kekerasan di Bukittinggi dan jurnalis yang dipiting oleh polisi saat meliput demo di Kota Padang yang tidak muncul di pemberitaan media.

Provinsi Sumatera Barat juga bernilai sangat rendah pada indikator: Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (51,45), Kebebasan dari Kekerasan (54,64), dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (58,36).

Provinsi Papua bernilai rendah pada indikator: Kebebasan dari Kekerasan (50,56), Etika Pers (55,72), Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (56,22), Jaminan Mempraktikkan Jurnalisme (56,33), dan Keragaman Pandangan (59,22). Sementara itu, Provinsi Maluku bernilai rendah pada indikator: Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (47,89), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (52,41), Kebebasan dari Kekerasan (57,56), Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (58,15), Akurat dan Berimbang (58,44), Etika Pers (58,78), dan Jaminan Mempraktikkan Jurnalisme (59,50).

Rekomendasi

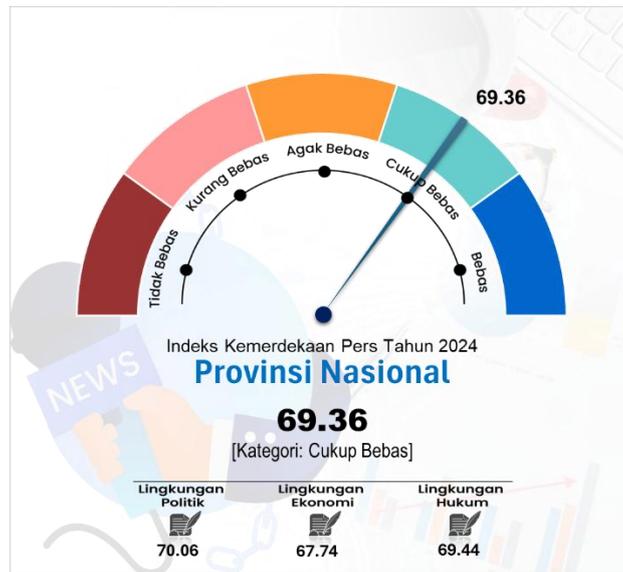
1. Untuk menangani secara tuntas kasus kekerasan yang menimpa jurnalis, selain Polri, aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung juga perlu mengawal proses penegakan hukum yang adil dan tuntas, dengan mengutamakan penerapan UU Pers dan mengedepankan hukum perdata dibandingkan hukum pidana pada kasus-kasus hukum yang melibatkan pers.
2. Dalam kaitannya dengan penanganan hukum di atas, Dewan Pers perlu memperkuat strategi dan melaksanakan kembali sosialisasi yang lebih efektif kepada berbagai lembaga penegakan hukum mengenai pentingnya UU Pers untuk menjadi rujukan utama proses hukum yang terkait jurnalisme demi upaya membangun jurnalisme pers sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi.
3. Dalam meningkatkan kebebasan pers dari adanya intervensi dan independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, Dewan Pers perlu melanjutkan sosialisasi yang lebih masif mengenai pentingnya jurnalisme yang independen dan profesional serta perbedaan antara perusahaan pers yang terverifikasi Dewan Pers

dengan yang tidak untuk membantu pemerintah daerah membangun kemitraan yang sehat dengan perusahaan pers.

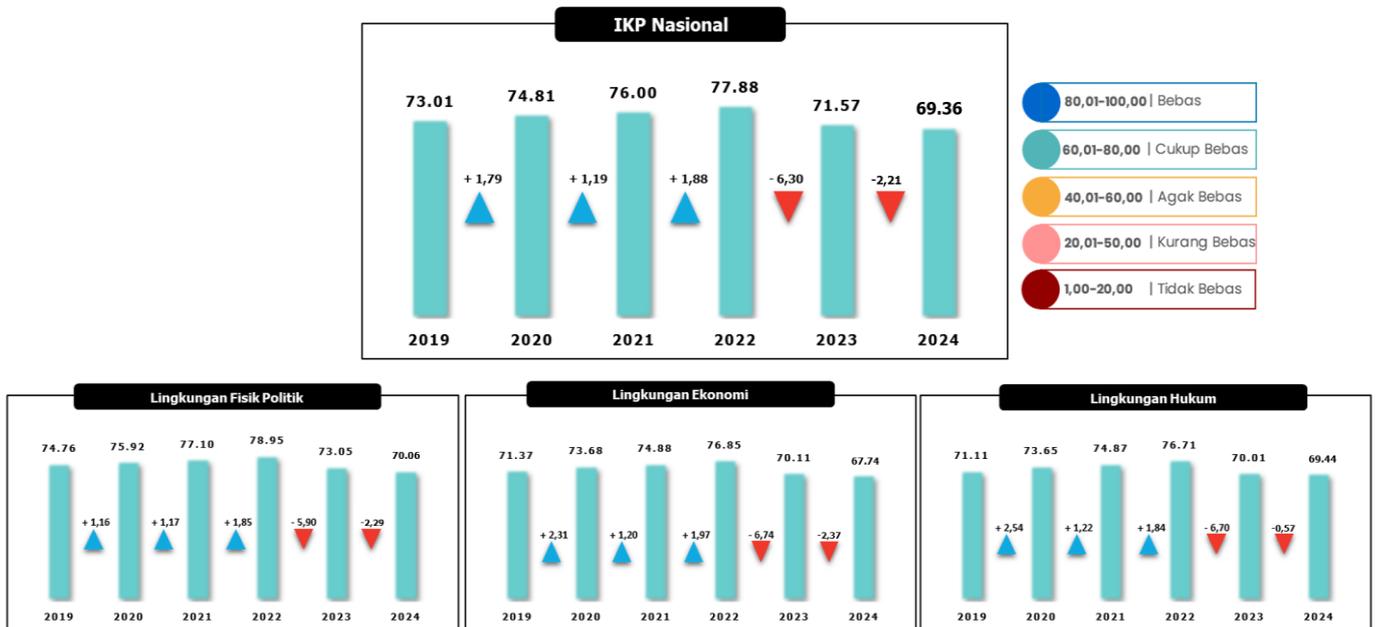
4. Kemendagri perlu menyusun aturan atau himbauan teknis kepada pemerintah daerah untuk mendahulukan kerjasama pemberitaan dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi Dewan Pers, termasuk himbauan kepada pemerintah daerah untuk membuat aturan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas serta aturan mengenai Kesetaraan bagi Kelompok Rentan.
5. Dewan Pers bekerjasama dengan organisasi media dan organisasi jurnalis perlu memperkuat strategi peningkatan kompetensi sekaligus pengawasan terhadap insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yang mengedepankan kode etik jurnalistik dan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
6. Bappenas, Kemenkominfo dan instansi pemerintah lainnya, serta DPR RI, terutama Komisi II dan Komisi III perlu menggulirkan adanya *Democracy Trust Fund* atau *Endowment Fund* untuk mengatasi beberapa masalah utama kemerdekaan pers di Indonesia, antara lain:
 - a. Memberi solusi kepada hampir semua perusahaan pers di Indonesia yang sangat bergantung pada berbagai kelompok kepentingan yang kuat yang dapat mengganggu independensi jurnalisme dan keberlangsungan pers yang sehat di Indonesia.
 - b. Memperbaiki tata kelola perusahaan pers yang saat ini makin terpuruk oleh kondisi ekonomi dan makin liberalnya situasi persaingan antara perusahaan pers dengan media sosial, *buzzer*, *influencer* dan media abal-abal yang menyebarkan berita hoaks yang berdampak negatif pada masyarakat.
 - c. Memperbaiki kesejahteraan para jurnalis yang pada gilirannya akan memberi dampak positif terhadap profesionalisme dan independensi jurnalis dalam membuat pemberitaan yang mengedepankan kepentingan publik.
7. BPK dapat menyusun panduan kemitraan yang profesional antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers, sekaligus mendorong Pemda membuat aturan agar kontrak pemberitaan yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat mendahulukan perusahaan pers yang terverifikasi Dewan Pers.
8. Dewan Pers perlu memperbanyak kerjasama pelatihan tentang penguatan aspek teknologi dalam pembuatan dan distribusi berita melalui platform online, termasuk penanganan dan mitigasi terhadap adanya potensi serangan siber yang menimpa media-media pers di Indonesia.

LAMPIRAN 1

GAMBAR HASIL SURVEI KEMERDEKAAN PERS 2024



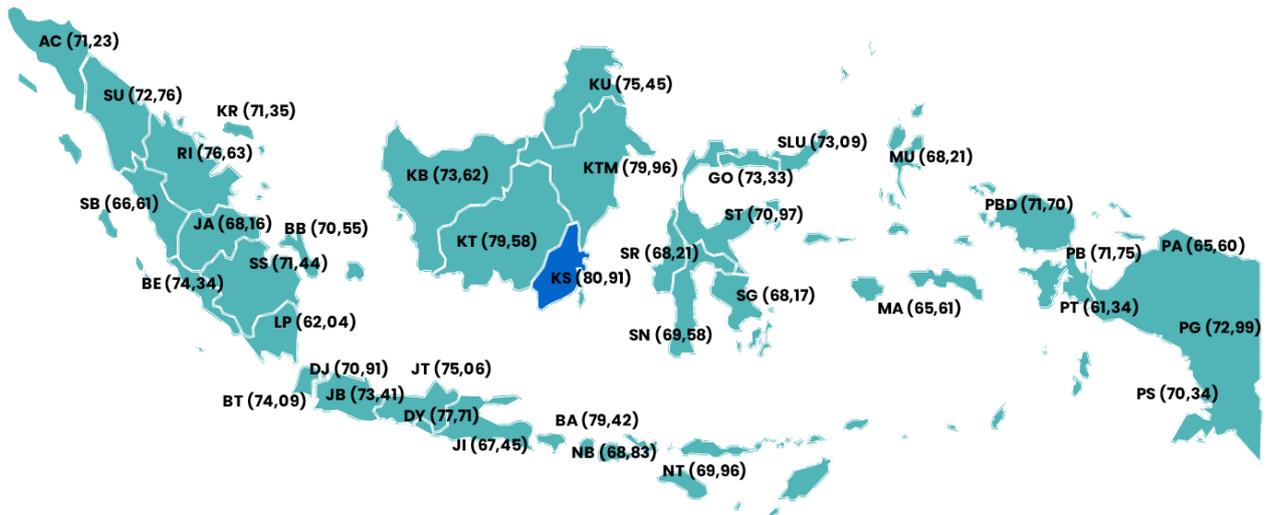
Gambar 1. Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2024



Gambar 2. Tren Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2024 dari Tahun 2019-2024

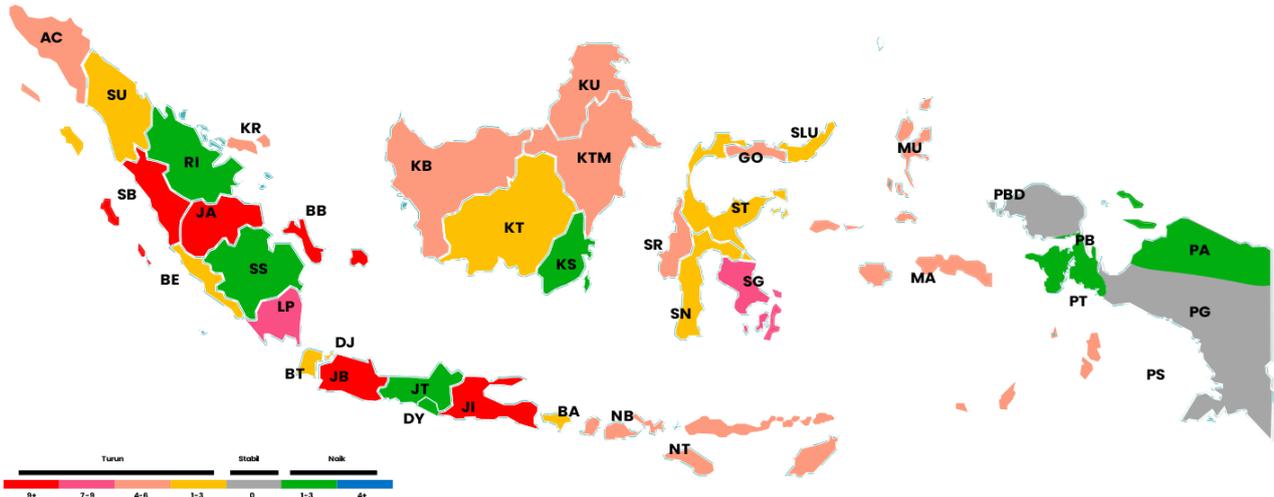
No	Provinsi	Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024	No	Provinsi	Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024
1	Kalimantan Selatan	80.91	20	Kepulauan Riau	71.35
2	Kalimantan Timur	79.96	21	Aceh	71.23
3	Kalimantan Tengah	79.58	22	Sulawesi Tengah	70.97
4	Bali	79.42	23	DKI Jakarta	70.91
5	DI Yogyakarta	77.71	24	Bangka Belitung	70.55
6	Riau	76.63	25	Papua Selatan	70.34
7	Kalimantan Utara	75.45	26	Nusa Tenggara Timur	69.96
8	Jawa Tengah	75.06	27	Sulawesi Selatan	69.58
9	Bengkulu	74.34	28	Nusa Tenggara Barat	68.83
10	Banten	74.09	29	Sulawesi Barat	68.21
11	Kalimantan Barat	73.62	30	Maluku Utara	68.21
12	Jawa Barat	73.41	31	Sulawesi Tenggara	68.17
13	Gorontalo	73.33	32	Jambi	68.16
14	Sulawesi Utara	73.09	33	Jawa Timur	67.45
15	Papua Pegunungan	72.99	34	Sumatera Barat	66.61
16	Sumatera Utara	72.76	35	Maluku	65.61
17	Papua Barat	71.75	36	Papua	65.60
18	Papua Barat Daya	71.70	37	Lampung	62.04
19	Sumatera Selatan	71.44	38	Papua Tengah	61.34

Gambar 3. Rincian Total Indeks Kemerdekaan Pers 2024 di 38 Provinsi



No	Kode	Provinsi	No	Kode	Provinsi	No	Kode	Provinsi	No	Kode	Provinsi
1	AC	Aceh	9	LP	Lampung	17	BA	Bali	25	GO	Gorontalo
2	SU	Sumatera Utara	10	BB	Kep. Bangka Belitung	18	NB	Nusa Tenggara Barat	26	SR	Sulawesi Barat
3	SB	Sumatera Barat	11	DJ	DKI Jakarta	19	NT	Nusa Tenggara Timur	27	SN	Sulawesi Selatan
4	RI	Riau	12	JB	Jawa Barat	20	KB	Kalimantan Barat	28	ST	Sulawesi Tengah
5	KR	Kepulauan Riau	13	BT	Banten	21	KT	Kalimantan Tengah	29	SG	Sulawesi Tenggara
6	JA	Jambi	14	JT	Jawa Tengah	22	KS	Kalimantan Selatan	30	SLU	Sulawesi Utara
7	SS	Sumatera Selatan	15	DY	DI Yogyakarta	23	KTM	Kalimantan Timur	31	MA	Maluku
8	BE	Bengkulu	16	JI	Jawa Timur	24	KU	Kalimantan Utara	32	MU	Maluku Utara

Gambar 4. Distribusi Indeks Kemerdekaan Pers 2024 di 38 Provinsi



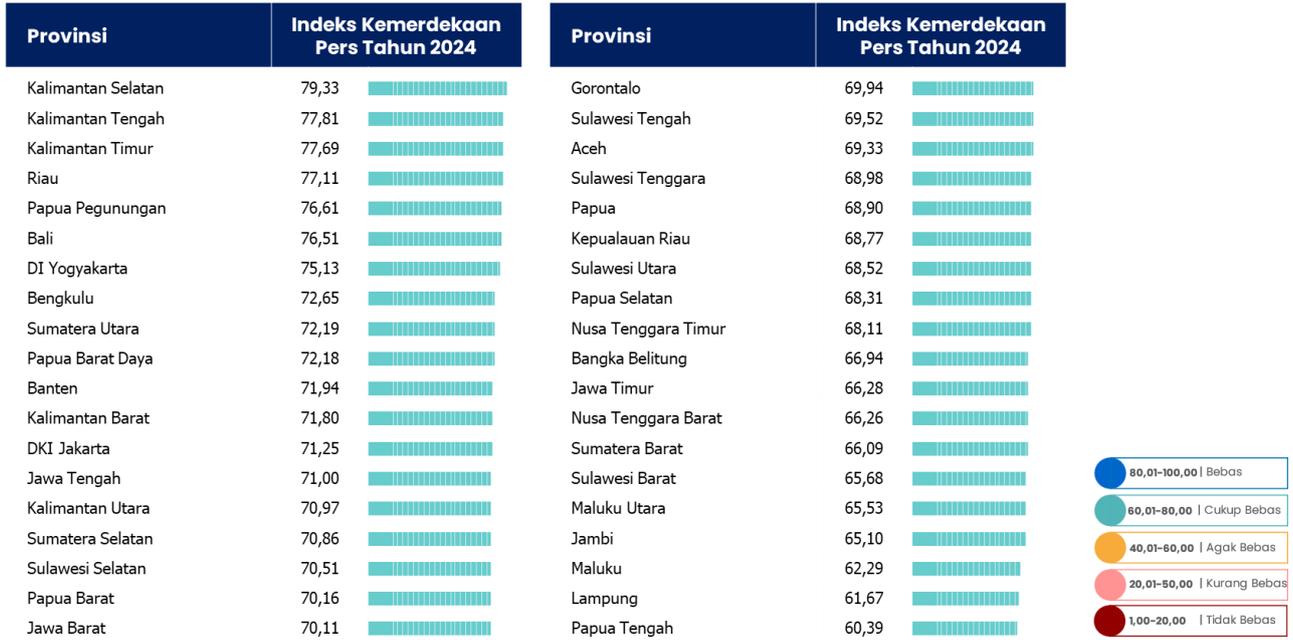
No	Kode	Provinsi	No	Kode	Provinsi	No	Kode	Provinsi	No	Kode	Provinsi	No	Kode	Provinsi
1	AC	Aceh	9	LP	Lampung	17	BA	Bali	25	GO	Gorontalo	33	PA	Papua
2	SU	Sumatera Utara	10	BB	Kep. Bangka Belitung	18	NB	Nusa Tenggara Barat	26	SR	Sulawesi Barat	34	PB	Papua Barat
3	SB	Sumatera Barat	11	DJ	DKI Jakarta	19	NT	Nusa Tenggara Timur	27	SN	Sulawesi Selatan	35	PT	Papua Tengah
4	RI	Riau	12	JB	Jawa Barat	20	KB	Kalimantan Barat	28	ST	Sulawesi Tengah	36	PBD	Papua Barat Daya
5	KR	Kepulauan Riau	13	BT	Banten	21	KT	Kalimantan Tengah	29	SG	Sulawesi Tenggara	37	PS	Papua Selatan
6	JA	Jambi	14	JT	Jawa Tengah	22	KS	Kalimantan Selatan	30	SLU	Sulawesi Utara	38	PG	Papua Pegunungan
7	SS	Sumatera Selatan	15	DY	DI Yogyakarta	23	KTM	Kalimantan Timur	31	MA	Maluku			
8	BE	Bengkulu	16	JL	Jawa Timur	24	KU	Kalimantan Utara	32	MU	Maluku Utara			

Gambar 5. Distribusi Perubahan Indeks Kemerdekaan Pers dari 2023 ke 2024 di 38 Provinsi. Perubahan Nilai IKP antara (+1) – (-1) Dikategorikan Stabil

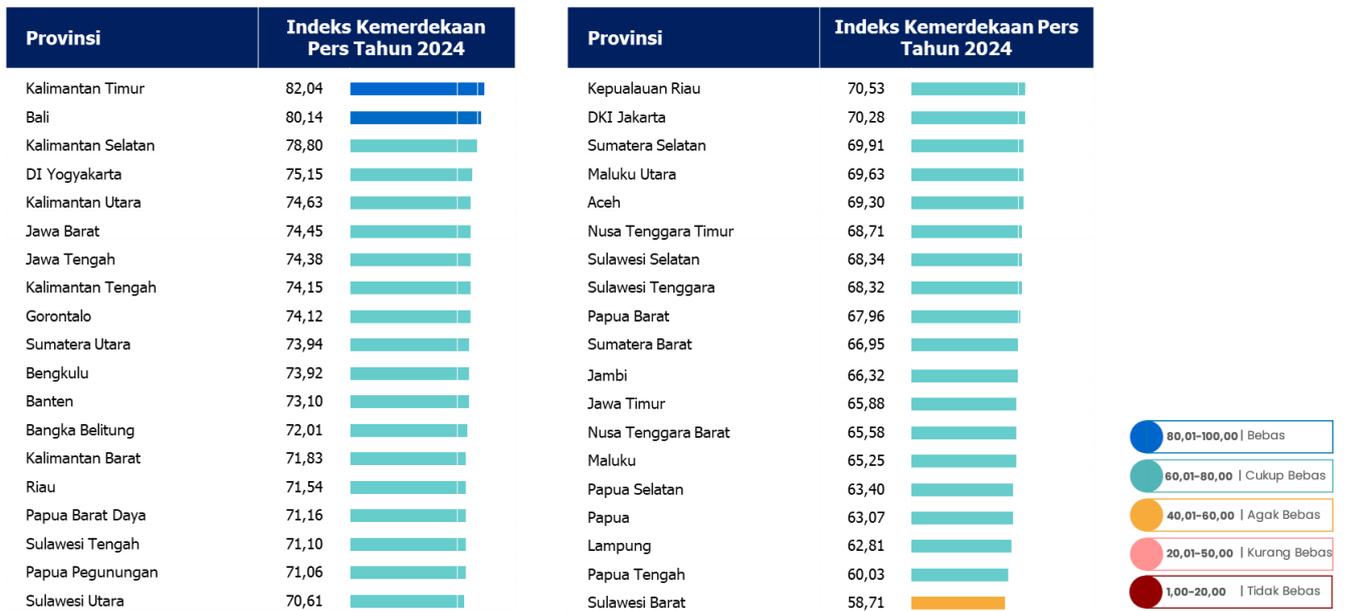
Provinsi	Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024	Provinsi	Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2024
Kalimantan Tengah	83,23	Sumatera Selatan	72,50
Kalimantan Selatan	82,73	Sumatera Utara	72,39
Bali	80,40	Papua Pegunungan	72,29
DI Yogyakarta	80,24	Papua Barat Daya	71,74
Kalimantan Timur	79,93	Nusa Tenggara Barat	71,71
Riau	79,05	Sulawesi Tengah	71,56
Kalimantan Utara	77,96	Bangka Belitung	71,47
Jawa Tengah	77,30	Nusa Tenggara Timur	71,47
Sulawesi Utara	76,52	DKI Jakarta	71,07
Banten	75,60	Jambi	70,55
Kalimantan Barat	75,39	Sulawesi Selatan	69,77
Bengkulu	75,33	Jawa Timur	68,80
Papua Selatan	74,90	Maluku Utara	68,71
Gorontalo	74,48	Sulawesi Tenggara	67,70
Papua Barat	74,46	Maluku	67,35
Jawa Barat	74,40	Sumatera Barat	66,67
Sulawesi Barat	74,35	Papua	65,36
Aceh	73,11	Papua Tengah	62,46
Kepulauan Riau	72,98	Lampung	61,80

- 80,01-100,00 | Bebas
- 60,01-80,00 | Cukup Bebas
- 40,01-60,00 | Agak Bebas
- 20,01-50,00 | Kurang Bebas
- 1,00-20,00 | Tidak Bebas

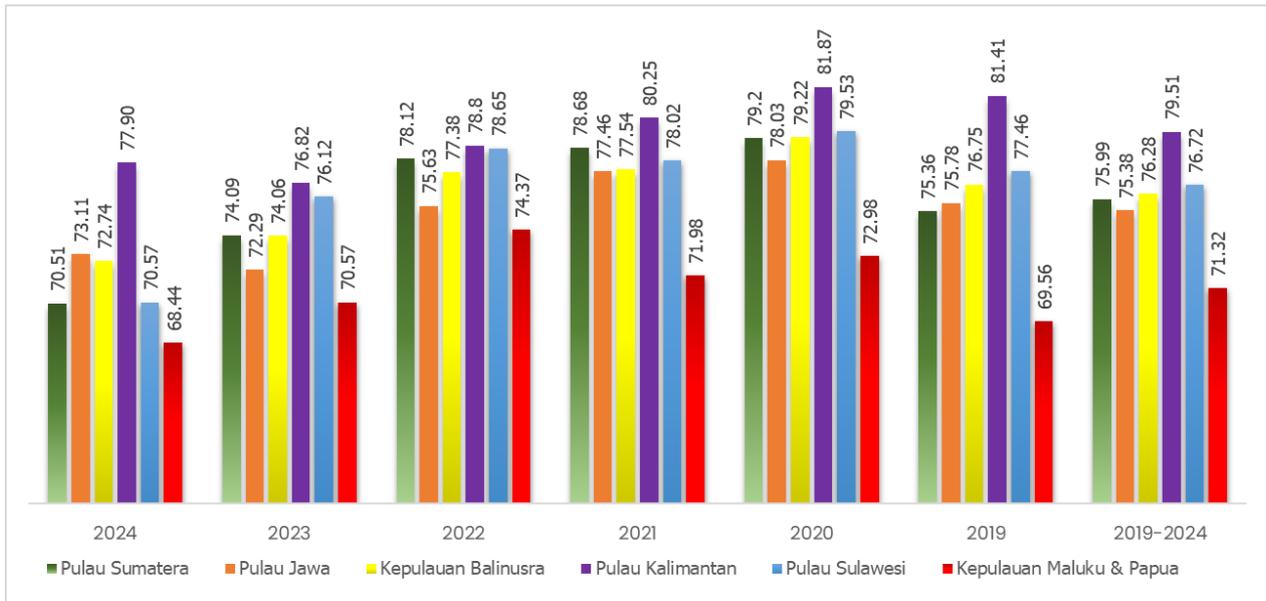
Gambar 6. Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2024 Lingkungan Fisik Politik di 38 Provinsi



Gambar 7. Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2024 Lingkungan Ekonomi di 38 Provinsi



Gambar 8. Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2024 Lingkungan Hukum di 38 Provinsi



Gambar 9. Sebaran Nilai Indeks Kemerdekaan Pers Berdasarkan Klaster Pulau/Kepulauan di Indonesia pada Periode Survei IKP 2019 - 2024

LAMPIRAN 2

TABEL HASIL SURVEI KEMERDEKAAN PERS 2024

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Per Provinsi , Indeks Kemerdekaan Pers NAC, dan Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2024

NO	Variabel Lingkungan dan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot (%)	PROV (1)	NAC (2)	NAS (3)
A	KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK	50.21	73.10	62.98	70.06
B	KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI	23.59	70.06	62.32	67.74
C	KONDISI LINGKUNGAN HUKUM	26.21	70.24	67.58	69.44
	INDEKS KEMERDEKAAN PERS		71.64	64.04	69.36

NO	Variabel Lingkungan dan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot (%)	PROV (1)	NAC (2)	NAS (3)
A	KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK				
1	Kebebasan dari Intervensi	9.27	73.03	59.29	68.90
2	Kebebasan dari Kekerasan	10.07	66.75	53.21	62.69
3	Keragaman Pandangan	6.25	74.94	69.00	73.16
4	Akses Atas Informasi Publik	2.56	72.96	65.50	70.72
5	Kebebasan Media Alternatif	2.27	81.97	66.86	77.44
6	Kebebasan Berserikat	2.09	81.70	66.14	77.03
7	Kesetaraan Bagi Kelompok Rentan	6.39	70.83	65.00	69.08
8	Akurat dan Berimbang	5.23	70.71	65.36	69.11
9	Pendidikan Insan Pers	6.09	79.94	70.71	77.17
B	KONDISI LINGKUNGAN EKONOMI				
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	1.74	75.76	69.71	73.95
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	9.88	68.13	60.00	65.69
12	Keragaman Kepemilikan	3.26	76.40	58.57	71.05
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	4.80	64.54	61.86	63.74
14	Kelembagaan Berorientasi Kepentingan Publik	3.91	73.93	68.57	72.32
C	KONDISI LINGKUNGAN HUKUM				
15	Jaminan Mempraktikkan Jurnalisme	2.60	69.51	70.00	69.66
16	Perlindungan Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	8.54	78.36	66.36	74.76
17	Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas	5.13	58.68	68.43	61.60
18	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	4.18	67.68	67.14	67.52
19	Etika Pers	3.81	71.08	67.86	70.12
20	Mekanisme Pemulihan	1.94	69.91	67.86	69.29

Keterangan :

1 Rata-rata 38 provinsi atas nilai yang diberikan oleh 7-15 Informan Ahli di setiap provinsi

2 Rata-rata nilai yang diberikan oleh 13 anggota National Assesment Council

3 $IKP\ Nasional = (70\% IKP\ Provinsi) + (30\% IKP\ NAC)$

	Nilai indikator IKP dengan kategori bebas (IKP 80,01-100,00)
	Nilai indikator IKP dengan kategori cukup bebas (IKP 60,01-80,00)
	Nilai indikator IKP dengan kategori agak bebas (IKP 40,01-60,00)
	Nilai indikator IKP dengan kategori kurang bebas (IKP 20,01-50,00)
	Nilai indikator IKP dengan kategori tidak bebas (IKP 1,00-20,00)

Tabel 2. Tren dan Peringkat Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi 2019 - 2024

No	Provinsi	IKP					Kenaikan/Penurunan					Peringkat						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2020	2020-2021	2020-2022	2022-2023	2023-2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nangroe Aceh Darussalam	82.17	75.68	75.84	76.39	75.43	71.23	-6.49	+0.16	+0.55	-0.96	-4.20	2	24	23	25	16	21
2	Sumatera Utara	68.58	77.87	75.50	75.92	72.89	72.76	+9.29	-2.37	+0.42	-3.03	-0.13	32	15	25	27	25	16
3	Sumatera Barat	72.67	80.64	81.59	78.72	78.90	66.61	+7.97	+0.95	-2.87	+0.18	-12.29	25	3	6	20	9	34
4	Kepulauan Riau	76.24	80.29	83.27	80.95	77.41	71.35	+4.05	+2.98	-2.32	-3.54	-6.06	9	5	1	12	11	20
5	Riau	79.35	79.83	76.39	82.01	74.79	76.63	+0.48	-3.44	+5.62	-7.22	+1.84	4	8	22	6	18	6
6	Jambi	71.25	79.00	80.09	83.68	77.23	68.16	+7.75	+1.09	+3.59	-6.45	-9.07	27	13	10	2	12	32
7	Bengkulu	74.52	75.38	77.84	77.52	75.33	74.34	+0.86	+2.46	-0.32	-2.19	-0.99	17	26	15	23	17	9
8	Sumatera Selatan	74.08	79.12	81.01	81.40	70.83	71.44	+5.04	+1.89	+0.39	-10.57	+0.61	20	12	8	10	31	19
9	Lampung	67.32	74.01	77.49	79.20	69.76	62.04	+6.69	+3.48	+1.71	-9.44	-7.72	33	29	19	18	32	37
10	Bangka Belitung	74.76	79.41	77.82	76.19	81.03	70.55	+4.65	-1.59	-1.63	+4.84	-10.48	13	11	16	26	6	24
11	Banten	73.05	77.40	74.92	74.50	74.33	74.09	+4.35	-2.48	-0.42	-0.17	-0.24	24	17	29	30	22	10
12	DKI Jakarta	74.04	72.14	75.35	79.42	71.73	70.91	-1.90	+3.21	+4.07	-7.69	-0.82	21	32	27	16	30	23
13	Jawa Barat	70.28	75.06	82.63	81.53	83.02	73.41	+4.78	+7.57	-1.10	+1.49	-9.61	29	28	2	8	2	12
14	Jawa Tengah	77.59	77.46	79.10	80.99	74.48	75.06	-0.13	+1.64	+1.89	-6.51	+0.58	6	16	13	11	21	8
15	Jawa Timur	69.40	75.89	75.04	72.88	76.55	67.45	+6.49	-0.85	-2.16	+3.67	-9.10	30	21	28	31	14	33
16	DI Yogyakarta	69.35	75.82	77.73	78.86	74.56	77.71	+6.47	+1.91	+1.13	-4.30	+3.15	31	23	17	19	20	5
17	Bali	76.30	76.44	75.70	79.78	82.58	79.42	+0.14	-0.74	+4.08	+2.80	-3.16	8	19	24	14	3	4
18	Nusa Tenggara Barat	72.23	75.10	79.31	79.62	72.89	68.83	+2.87	+4.21	+0.31	-6.73	-4.06	26	27	11	15	25	28
19	Nusa Tenggara Timur	73.63	80.58	77.61	78.24	74.78	69.96	+6.95	-2.97	+0.63	-3.46	-4.82	22	4	18	22	19	26
20	Kalimantan Barat	76.47	79.75	79.09	82.32	79.07	73.62	+3.28	-0.66	+3.23	-3.25	-5.45	7	9	14	5	8	11
21	Kalimantan Selatan	75.14	79.87	81.62	78.58	80.13	80.91	+4.73	+1.75	-3.04	+1.55	+0.78	11	7	5	21	7	1
22	Kalimantan Tengah	79.52	75.86	81.50	83.23	81.05	79.58	-3.66	+5.64	+1.73	-2.18	-1.47	3	22	7	3	5	3
22	Kalimantan Tengah	75.52	82.62	81.75	81.94	72.61	70.97	+7.10	-0.87	+0.19	-9.33	-1.64	10	1	4	7	26	22
23	Kalimantan Timur	74.54	81.91	82.24	83.78	84.38	79.96	+7.37	+0.33	+1.54	+0.60	-4.42	16	2	3	1	1	2
24	Kalimantan Utara	78.43	76.62	76.79	81.43	82.42	75.45	-1.81	+0.17	+4.64	+0.99	-6.97	5	18	21	9	4	7
25	Sulawesi Selatan	73.09	78.13	80.65	77.28	72.59	69.58	+5.04	+2.52	-3.37	-4.69	-3.01	23	14	9	24	27	27
27	Sulawesi Utara	74.37	79.92	79.10	79.36	76.20	73.09	+5.55	-0.82	+0.26	-3.16	-3.11	19	6	13	17	15	14
28	Sulawesi Barat	74.95	79.52	77.31	82.53	73.09	68.21	+4.57	-2.21	+5.22	-9.44	-4.88	12	10	20	4	23	30
29	Sulawesi Tenggara	84.40	76.16	75.42	80.47	76.67	68.17	-8.24	-0.74	+5.05	-3.80	-8.50	1	20	26	13	13	31
30	Gorontalo	74.39	75.56	73.87	75.61	78.63	73.33	+1.17	-1.69	+1.74	+3.02	-5.30	18	25	30	28	10	13
31	Maluku	74.57	72.64	68.30	69.84	72.22	65.61	-1.93	-4.34	+1.54	+2.38	-6.61	15	31	34	33	29	35
32	Maluku Utara	74.57	72.64	68.30	69.84	72.22	68.21	-1.93	-4.34	+1.54	+2.38	-6.61	15	31	34	33	29	30
33	Papua	66.28	70.02	68.85	75.57	64.01	65.60	+3.74	-1.17	+6.72	-11.56	+1.59	34	34	32	29	34	36
34	Papua Barat	70.46	70.95	70.56	69.23	68.22	71.75	+0.49	-0.39	-1.33	-1.01	+3.53	28	33	31	34	33	17
34	Papua Barat Daya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71.70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18
35	Papua Pegunungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72.99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15
36	Papua Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	38
37	Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25

Tabel 3. Tren dan Peringkat Per Indikator IKP Nasional 2019 - 2024

No	Lingkungan dan Indikator	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Indeks	Peringkat										
Lingkungan Fisik Politik													
1	Kebebasan dari Intervensi	74.48	11	74.96	14	75.71	13	77.80	14	70.56	15	68.90	15
2	Kebebasan dari Kekerasan	75.31	7	75.36	12	76.39	12	77.92	13	70.73	14	62.69	19
3	Keragaman Pandangan	74.42	12	75.17	13	77.29	11	78.03	12	75.25	7	73.16	6
4	Akses Atas Informasi Publik	79.18	2	78.30	5	78.67	7	81.98	6	75.58	6	70.72	9
5	Kebebasan Media Alternatif	75.69	6	78.01	6	82.50	2	80.45	7	79.55	1	77.44	1
6	Kebebasan Berserikat	79.41	1	79.82	1	83.96	1	86.87	1	78.92	2	77.03	3
7	Kesetaraan Bagi Kelompok Rentan	69.27	18	71.96	17	72.88	17	74.95	17	69.43	17	69.08	14
8	Akurat dan Berimbang	74.75	9	76.38	9	74.54	16	78.34	11	71.68	11	69.11	13
9	Pendidikan Insan Pers	76.61	4	79.72	2	81.77	3	83.51	3	77.90	4	77.17	2
Lingkungan Ekonomi													
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	74.53	10	79.00	3	80.22	6	82.02	5	76.28	5	73.95	5
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat	69.82	17	71.36	18	72.58	18	74.80	18	66.06	19	65.69	17
3	Keragaman Kepemilikan	76.64	3	78.95	4	81.68	4	83.94	2	78.47	3	71.05	8
4	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)	67.80	19	70.85	19	70.47	19	72.09	19	68.34	18	63.74	18
5	Kelembagaan Berorientasi Kepentingan Publik	73.88	13	76.28	10	78.07	9	79.68	9	72.83	10	72.32	7
Lingkungan Hukum													
1	Jaminan Mempraktikkan Jurnalisme	73.72	14	75.90	11	77.78	10	77.70	15	71.30	12	69.66	11
2	Perlindungan Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	75.86	5	77.95	7	80.89	5	82.38	4	73.25	9	74.76	4
3	Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas	56.77	20	63.56	20	62.08	20	63.68	20	61.50	20	61.60	20
4	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	73.16	16	74.41	15	75.25	14	76.81	16	70.47	16	67.52	16
5	Etika Pers	73.70	15	73.71	16	74.55	15	79.29	10	71.12	13	70.12	10
6	Mekanisme Pemulihan	75.06	8	76.55	8	78.09	8	79.68	9	73.37	8	69.29	12

LAMPIRAN 3

METODOLOGI PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS

Secara metodologis tidak ada perubahan dalam penyelenggaraan survei IKP 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni menggunakan metoda pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mix method*). Nilai kuantitatif diperoleh dari jawaban responden (informan ahli) terhadap kuesioner, yang kemudian dilakukan proses triangulasi melalui *focus group discussion* (FGD) sekaligus untuk memperoleh data kualitatif.

Jumlah indikator tetap 20, dengan jumlah pertanyaan 62. Pada tahun-tahun sebelumnya jumlah pertanyaan 72.

Informan ahli terdiri dari unsur state/birokrasi, *civil society*, dan korporasi/bisnis media dan umum. Pada Survei IKP 2024 jumlah informan ahli di setiap provinsi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Di wilayah dengan jumlah penduduk di bawah 5 juta orang (wilayah kecil), jumlah informan ahli 9 orang; 5-10 juta penduduk (wilayah menengah) 12 orang, dan di atas 10 juta (wilayah besar) 15 orang. Pada tahun sebelumnya jumlah informan ahli sama di semua provinsi.

Tabel 4. Variabel, Indikator, dan Bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2024

Indeks Kemerdekaan Pers		Bobot (%) *
INDEKS TOTAL		
A. Lingkungan Fisik Dan Politik		50.21%
C1.	Kebebasan Dari Intervensi (4)**	18.46%
C2.	Kebebasan Dari Kekerasan (2)	20.06%
C3.	Keragaman Pandangan (2)	12.45%
C4.	Akses Atas Informasi Publik (4)	5.10%
C5.	Kebebasan Media Alternatif (1)	4.52%
C6.	Kebebasan Berserikat (3)	4.16%
C7.	Kesetaraan Bagi Kelompok Rentan (6)	12.73%
C8.	Akurat Dan Berimbang (1)	10.42%
C9.	Pendidikan Insan Pers (1)	12.13%
B. Lingkungan Ekonomi		23.59%
C10.	Kebebasan Pendirian Dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (6)	7.38%
C11.	Independensi Dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat (3)	41.88%
C12.	Keragaman Kepemilikan (2)	13.82%
C13.	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) (3)	20.35%
C14.	Kelembagaan Berorientasi Kepentingan Publik (Penyiaran Publik, Regulator, Dan Perusahaan Pers). (7)	16.57%
C. Lingkungan Hukum		26.21%
C15.	Jaminan Mempraktikkan Jurnalisme (2)	9.92%
C16.	Perlindungan Kriminalisasi Dan Intimidasi Pers (4)	32.60%
C17.	Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (1)	19.58%
C18.	Independensi Dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (2)	15.95%
C19.	Etika Pers (2)	14.54%
C20.	Mekanisme Pemulihan (6)	7.40%
<i>Catatan:</i>		
*	Bobot setiap indikator terhadap total bobot 20 indikator kondisilingkungan. Total bobot 100%	
**	Angka dalam kurung menunjukkan jumlah subindikator	

Komposisi Informan Ahli 30% berasal dari Informan Ahli di Kabupaten/Kota. Penentuan Informan Ahli dari Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan Kabupaten/Kota yang prominent, yaitu terkait dengan informasi data kasus kekerasan terhadap wartawan.

Sebelum mengisi kuesioner, Informan Ahli sudah mendapatkan briefing melalui bimbingan teknis (secara daring) dan data sekunder mengenai informasi berkaitan dengan dinamika pemberitaan berkaitan dengan kasus- kasus kemerdekaan pers yang melibatkan aparat keamanan, ASN, LSM masyarakat sipil, bahkan masyarakat pers itu sendiri. Data ini sebagai pengetahuan, tidak menjadi bobot penilaian.

Saat melakukan penilaian pada masing-masing pernyataan di kuesioner, Informan Ahli diminta untuk memberi Nilai dari '1' hingga '100' sesuai acuan pada Tabel 1. Informan Ahli dapat menambahkan penjelasan atau tanggapan mendalam yang mendasari penilaian yang telah diberikan.

Data primer (penilaian Informan Ahli sebagai jawaban atas kuesioner) diolah dan disusun menjadi hasil nilai IKP. Nilai IKP merupakan rata-rata terbobot dari nilai pada 20 indikator pada tiga kondisi lingkungan (lihat Tabel 1.). Hasil IKP yang diperoleh di setiap provinsi menjadi nilai IKP Provinsi.

Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers oleh NAC. Pada forum FGD, 15 anggota NAC melakukan triangulasi kondisi kebebasan pers nasional berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan objektif terhadap 20 indikator IKP, dan memberi nilai terhadap 20 indikator IKP, dan hasilnya adalah nilai IKP NAC. Namun pada peserta yang datang pada saat pelaksanaan NAC hanya 14 orang.

Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers Nasional. Nilai IKP Nasional dihitung dari nilai rata-rata dari 38 provinsi (IKP Provinsi) dan nilai rata-rata dari 15 (yang hadir 14) Dewan Penyelia Nasional (IKP NAC), dengan bobot masing-masing 70% dan 30%, dengan menggunakan formula:

$$IKP\ Nasional = 70\% IKP\ Provinsi + 30\% IKP\ NAC$$

Kategori *Kondisi Kemerdekaan Pers*. Kondisi kategori kemerdekaan pers dikelompokkan menjadi lima kelas berdasarkan nilai IKP (**Tabel 1.**) Semakin tinggi nilai maka kondisi kemerdekaan pers semakin "Bebas".

Tabel 5. Selang Nilai dan Kategori Kondisi Kemerdekaan Pers

Selang Nilai IKP			Kondisi Kemerdekaan Pers
81	-	100	Bebas
61	-	80	Cukup Bebas
41	-	60	Agak Bebas
21	-	40	Kurang Bebas
1	-	20	Tidak Bebas



**RINGKASAN EKSEKUTIF
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2024**